RENCANA KERJA
TAHUN 2024



DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN ASAHAN

PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
JALAN WR SUPRATMAN NO.4 TELP. (0623) 41236
KISARAN - 21216

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN ASAHAN

NOMOR : 000.7/1225/VII/PMD/2023

TENTANG

RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2024

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN ASAHAN

Menimbang : bahwa dalam rangka penyusunan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Asahan Tahun 2024, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Asahan tentang Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Asahan Tahun 2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114)

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447)

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 4);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 5);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Asahan (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Asahan (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 2;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2021-2026 (lembar Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 3);

18. Peraturan Bupati Asahan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Musyawarah Perancanaan Pembangunan Secara Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2016 Nomor 39);

19. Peraturan Bupati Asahan Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2021 Nomor 41);

20. Peraturan Bupati Asahan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2023 Nomor 22).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN ASAHAN TENTANG RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2024.

KESATU : Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Asahan dimaksud, tertuang dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Asahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU disusun dengan Sistematika sebagai berikut :

1. BAB I. PENDAHULUAN.
2. BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.
3. BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.
4. BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
5. BAB V. PENUTUP

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kisaran
Pada tanggal : 25 Juli 2023

KEPALA PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN ASAHAN,

SUHERMAN SIREGAR, S.STP, MM
PEMBINA Tk. I
NIP. 19780412 199703 1 001

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Asahan Tahun 2024 dapat diselesaikan.

Renja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah Dokumen Perencanaan OPD untuk 1 (satu) tahun yang memuat Kebijakan, Program, dan Kegiatan Pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Selanjutnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada Bapak Bupati Asahan yang tanpa lelah selalu memberikan motivasi kepada kami untuk terus bekerja penuh semangat demi mewujudkan ***"Masyarakat Asahan Sejahtera yang Religius dan Berkarakter"*** guna meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Asahan.

Akhirnya kepada Allah SWT kami berserah diri dan berdo'a semoga apa yang telah direncanakan mendapat izin dan ridho-Nya, sehingga program dan kegiatan untuk Tahun 2024 dapat terlaksana dengan baik.

Kisaran, 25 Juli 2023

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
KAB. ASAHAN,

SUHERMAN SIREGAR, S.STP, MM
PEMBINA Tk. I
NIP. 19780412 199703 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... i
DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang..... 1
1.2. Landasan Hukum 5
1.3. Maksud Tujuan 6
1.4. Sistematika Penulisan 7

BAB II EVALUASI HASIL RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2022
2.1. Evaluasi Hasil Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD 12
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD..... 13
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD..... 17
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD..... 17
2.5. Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat..... 17

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 19
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja 20
3.2. Program dan Kegiatan..... 21

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 22
BAB V PENUTUP 23

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dorongan dan tuntutan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih, good governance and clean government terus berkembang dengan prinsip profesionalisme, transparansi, akuntabilitas, pelayanan prima, efesiensi, efektifitas, dan demokratis.

a. Pengertian Rencana Kerja (Renja) OPD

Dalam rangka meningkatkan manajemen penyelenggaraan pemerintah daerah, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Asahan menyusun rencana kerja (Renja) OPD. Renja OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah, maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Renja tahun 2024 disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi, yang diselaraskan dengan Rencana Strategis (Renstra) dan RPJMD Provinsi Sumatera Utara. Program dan kegiatan yang telah tersusun pada tahun 2024 dengan tambahan ataupun perubahan nama kegiatan serta beberapa sub-sub kegiatan yang diuraikan dari program dan kegiatan utama yang bertujuan untuk menyelaraskan antara program dan kegiatan yang tertuang pada tugas pokok dan fungsi dimaksud, meliputi: Program Pelayan Administrasi Perkantoran, Peningkatan sarana dan prsarana perkantoran, Peningkatan Disiplin Aparatur, Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Pengembagan data/Informasi, Perencanaan pembangunan daerah, Perencanaan pembangunan bidang social budaya, Perencanaan tata ruang, Perencanaan prasarana wilayah, dan sumber daya alam.

b. Proses Penyusunan Renja OPD

Proses penyusunan Renja OPD disusun berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Praturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menegah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada pasal 129 disajikan dengan sistimatika

a. Pendahuluan
b. Hasil evaluasi renja perangkat daerah tahun lalu
c. Tujuan dan sasaran perangkat daerah
d. Rencana kerja dan pendanaan perangakat daerah dan
e. Penutup.

Tahapan persiapan meliputi pembentukan tim Renja OPD, orientasi mengenai Renja OPD, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi.

1. Pembentukan Tim Penyusun Renja OPD.

   Anggota tim penyusun Renja OPD adalah pejabat dan staf OPD yang benar-benar siap untuk bertugas secara penuh dalam menyiapkan dokumen Renja OPD. Dengan demikian yang dipilih adalah yang punya kesiapan waktu dan kemampuan teknis yang cukup.

   Anggota tim yang dipilih diprioritaskan yang memiliki kompetensi, mempunyai latar belakang pendidikan atau pengalaman di bidang perencanaan daerah dan paham akan substansi tugas dan fungsi OPD. Tim penyusun terdiri atas perwakilan dari setiap bidang yang ada di masing-masing OPD, dan diketuai oleh orang yang bertanggungjawab atas perencanaan di OPD.

2. Orientasi mengenai Renja OPD.

   Orientasi mengenai Renja OPD perlu diberikan kepada tim untuk penyamaan persepsi terkait teknis penyusunan Renja OPD, hubungan Renja OPD dengan dokumen perencanaan lainnya, mengetahui aspek-aspek regulasi yang terkait dengan perencanaan dan penganggaran daerah.

3. Penyusunan Agenda Kerja.

   Jangka waktu penyelesaian dokumen Renja OPD sangat ketat dan padat. Untuk itu perlu disusun agenda kerja yang memerinci setiap tahapan kegiatan penyusunan dokumen Renja OPD dengan satuan waktu sejak persiapan, sampai dengan penetapan Renja OPD. Agenda kerja tersebut dapat dituangkan dalam sebuah matrik kalender kegiatan.

4. Pengumpulan Data dan Informasi.

   Setiap usulan program dan kegiatan perlu didukung data atau informasi yang memadai dan akurat dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Data atau informasi dikumpulkan sedemikian rupa hingga memperlihatkan secara jelas

capaian kinerja penyelenggaraan urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang menjadi tanggungjawab sesuai dengan tugas fungsi OPD.

Pengumpulan data dapat dilakukan berdasarkan langkah-langkah berikut :

a. Menyusun daftar data/informasi yang dibutuhkan bagi penyusunan Renja OPD dan disajikan dalam bentuk matrik (check list) untuk memudahkan dalam analisis.
b. Mengumpulkan data/informasi dari sumber-sumber yang dapat dipertanggungjawabkan.
c. Menyiapkan tabel-tabel/matrik kompilasi data yang sesuai dengan kebutuhan analisis.

Data dan informasi yang perlu dikumpulkan dalam proses penyusunan Renja OPD, antara lain:

a. Peraturan perundang-undangan terkait.
b. Kebijakan-kebijakan nasional yang terkait.
c. Dokumen-dokumen.
d. Dokumen-dokumen RKPD.
e. Dokumen RKPD dan hasil evaluasi pelaksanaannya.
f. Dokumen hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun-tahun sebelumnya.
g. Dokumen APBD tahun berjalan dan realisasi APBD tahun-tahun sebelumnya.
h. Data pokok statistik daerah sampai dengan versi terakhir.
i. Data khusus lainnya dari setiap OPD yang dibutuhkan.

c. Keterkaitan antara Renja OPD dengan dokumen RKPD, Renstra OPD, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RPJMD harus mengacu dan selaras dengan RPJP dan RPJM Nasional karena keberhasilan pembangunan di daerah seperti yang direncanakan akan menjadi bagian dari keberhasilan pembangunan nasional. Rencana Pembangunan Nasional yang tertuang dalam RPJM Nasional menjadi perhatian Pemerintah Daerah dalam merancang pembangunan di daerah sesuai kondisi daerah. Substansi tujuan pembangunan nasional lima tahunan untuk kesejahteraan rakyat menjadi inti dari rencana pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026 yang selanjutnya dirinci dalam rencana tahunan dalam RKPD.

RPJMD disusun dari proses penjabaran atas visi, misi dan program kepala daerah, berperan sebagai acuan dasar dalam menentukan arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah yang pada intinya memuat mengenai arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, serta kebijakan umum. RPJMD tidak dapat dipisahkan keberadaannnya dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya. RPJMD terintegrasi dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen perencanaan lainnya baik di tingkat nasional maupun daerah, terutama dengan dokumen perencanaan dan penganggaran yang dikeluarkan pemerintah daerah.

Dokumen itu meliputi RPJPD, Renstra OPD, RKPD dan Renja OPD. Semua dokumen perencanaan dimaksud mencakup 3 kerangka waktu, yaitu rencana jangka panjang 20 tahun, rencana jangka menengah 5 tahun, dan rencana jangka pendek 1 tahun. Secara substansi, keberadaan RPJMD ini dengan dokumen perencanaan membentuk keterkaitan yang bersifat hierarki, yaitu dokumen dengan jangka waktu yang lebih panjang menjadi rujukan bagi dokumen dengan jangka waktu yang lebih pendek.

d. Proses penyusunan RAPBD

Renja-OPD disusun dengan mengacu pada rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) OPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, serta masalah yang dihadapi. Dalam menyusun Renja-OPD perlu ditetapkan pula tujuan, sasaran, indikator kinerja, pagu indikatif, prakiraan maju, melakukan analisis serta penyelarasan program dan kegiatan sesuai skala prioritas daerah sebagai upaya pensinergian pencapaian sasaran dan target Renstra OPD dan RPJMD tahun yang bersangkutan.

Renja-OPD mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja-OPD menerjemahkan perencanan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra OPD) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan, Renja menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah – langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur. Dengan demikian Renja merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)-OPD. RKPD menjadi dasar dalam penyusunan Renja OPD yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi dari tiap OPD. Dokumen ini akan bermanfaat dalam rangka mewujudkan keterpaduan dan mensinergikan pembiayaan pembangunan dari berbagai APBN dan APBD. Program pembangunan yang tertuang dalam RKPD menjadi acuan dalam penyusunan KUA-

PPAS APBD Kabupaten yang selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD Tahun 2024.

1.2. Landasan Hukum

Dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2024, peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai rujukan adalah:

1. Landasaan Idiil Dasar Negara RI yaitu Pancasila
2. Landasan Konstitusional UUD Negara RI yaitu UUD 1945
3. Landasan Operasional

a. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

e. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubahbeberapa kaliterakhirdengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan KeduaAtas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

f. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

h. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

i. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang LaporandanEvaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114)

l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447)

m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

n. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang DaerahTahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 4);

o. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 5);

p. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Asahan (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas

Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Asahan (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 2);

q. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 3);

r. Peraturan Bupati Asahan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Musyawarah Perancanaan Pembangunan Secara Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2016 Nomor 39);

s. Peraturan Bupati Asahan Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2021 Nomor 41).

t. Peraturan Bupati Asahan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2023 Nomor 22).

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) dimaksudkan untuk memberikan acuan dan dasar hukum bagi pembangunan jangka pendek Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Asahan pada tahun 2024. Selain itu, untuk menjamin keterpaduan dan kesinambungan kegiatan Perencanaan Pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

1.3.2. Tujuan

Rencana Kerja (RENJA) disusun dengan tujuan memberikan arahan dan pedoman teknis bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Asahan dalam menyusun Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) dan Rencana Operasional Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Asahan.

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja OPD, proses penyusunan Renja OPD, keterkaitan antara Renja OPD dengan dokumen RKPD, Renstra OPD, dengan Renja K/L dan tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja OPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja OPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II : Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Asahan Tahun 2022.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Tahun 2022 dan Capaian Renstra OPD

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun sebelumnya dan perkiraan capaian tahun berjalan, mengacu pada APBD tahun berjalan.

Dikaitkan dengan pencapaian target Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya.

- Cakupan telaahan/review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun sebelumnya :
  1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra OPD dan kinerja pelayanan OPD;
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

- Pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dengan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan OPD sesuai dengan tugas dan fungsi

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

- Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan OPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan OPD, uraikan mengenai koordinasi dan sinergi program antara OPD Prov dengan OPD kab/kota serta dengan Kementerian/Lembaga di tingkat pusat dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan
- Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD
- Dampaknya terhadap visi, misi lima tahunan pembangunan Kabupaten, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM, MDGs
- Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun 2022.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

- Proses yang dilakukan, yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
- Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;

- Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misal: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat dalam rancangan awal RKPD atau program dan kegiatan sesuai dengan rancangan awal RKPD namun besarannya berbeda.
- Catatan penting juga diarahkan terhadap kemungkinan perubahan atau penyesuaian atas tujuan dan sasaran

  tahunan dalam Renja OPD (yang mungkin tak lagi sesuai dengan Renstra OPD).

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

- Berisi uraian mengenai hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, terkait langsung dengan pelayanan OPD Kabupaten, LSM, asosiasi, perguruan tinggi maupun dari OPD Kecamatan yang langsung ditujukan kepada OPD Kabupaten maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi OPD Kabupaten dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kab/kota (bila sudah dilakukan)
- Deskripsi yang perlu disajikan pada sub bab ini, antara lain:
  a. Penjelasan tentang proses bagaimana program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
  b. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tupoksi OPD.

BAB III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional, serta yang terkait dengan tupoksi OPD.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tupoksi OPD dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD

3.3. Program dan Kegiatan

Berisi nama program dan kegiatan, baik untuk belanja langsung perkantoran/manajerial maupun,

- Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan misal:
  - Pencapaian visi dan misi pembangunan lima tahun
  - Pencapaian MDGs
  - Pengentasan kemiskinan
  - Pencapaian SPM
  - Pendayagunaan potensi ekonomi daerah
  - Pengembangan daerah terisolir
  - dst
- Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:
  - Jumlah program dan jumlah kegiatan
  - Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan
  - Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya

Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif maupun kombinasi keduanya

BAB IV Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah

.BAB V Penutup

Berisi uraian penutup, berupa:

- Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan
- Kaidah-kaidah pelaksanaan
- Rencana tindak lanjut

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2022

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa kabupaten Asahan Tahun 2022 dan Capaian Renstra SKPD

Pelaksanaan Program/Kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Asahan sampai dengan akhir Desember 2022 adalah 90,67 % dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 12.668.520.118,80 (Dua Belas Milyar Enam Ratus Enam Puluh Delapan Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Seratus Delapan Belas Rupiah Delapan Puluh Sen) .

Adapun rincian besaran anggaran program / kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Asahan Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

a. ***PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA***

   Pagu Anggaran sebesar Rp. 4.117.585.562,00 (Empat Milyar Seratus Tujuh Belas Juta Lima Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Lima Ratus Enam Puluh Dua Rupiah);

b. ***PROGRAM PENATAAN DESA***

   Pagu Anggaran sebesar Rp. 50.000.125,00 (Lima Puluh Juta Seratus Dua Puluh Lima Rupiah);

c. ***PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA***

   Pagu Anggaran sebesar Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah);

d. ***PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA***

   Pagu Anggaran sebesar Rp. 8.537.734.808,00 (Delapan Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Delapan Rupiah);

e. ***PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT***

   Pagu Anggaran sebesar Rp. 1.217.339.519,00 (Satu Milyar Dua Ratus Tujuh Belas Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Sembilan Belas Rupiah);

Pada dasarnya untuk Tahun Anggaran 2022 ini, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Asahan sampai saat ini telah melaksanakan kegiatan yang dianggarkan untuk Tahun Anggaran 2022.

Dalam rangka mendukung keberhasilan pencapaian program / kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Asahan dan untuk mengukur capaian Renstra SKPD pada tahun 2021-2026.

Untuk lebih jelasnya tentang penggunaan anggaran pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Asahan Tahun 2022 sampai bulan Desember 2022 dapat dilihat pada tabel II.1 dilampiran Renja.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa kabupaten Asahan

Program dan kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Asahan hingga akhir bulan Desember 2022 telah dilaksanakan.

Bila dikaitkan kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Asahan dengan RPJMD Kabupaten Asahan Tahun 2021 – 2026, maka hasil analisisnya adalah :

- Tersalurkannya Alokasi Dana Desa dan Dana Desa di Kabupaten Asahan.
- Adanya peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan melalui pembinaan yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Asahan.
- Adanya peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa melalui kegiatan gotong royong masyarakat, dan hal ini juga merupakan salah satu bentuk swadaya / partisipasi masyarakat terhadap program Pemberdayaan Masyarakat;

- Adanya peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemerintahan Desa karena para Kepala Desa dan Perangkatnya sebagian besar telah mengikuti berbagai pelatihan.
- Terlaksananya Visi Misi Bupati yaitu terciptanya Kampung Mandiri yang penentuan lokasinya akan dikoordinir oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan di dukung oleh beberapa OPD terkait.
- Terlaksananya Visi Misi Bupati yaitu terbentuknya Desa wisata untuk meningkatkan perekonomian desa.
- Terlaksananya Rencana Aksi Sumber Daya Manusia (SDM) yang merupakan target Bupati di tahun 2024.

Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Asahan yang dikaitkan dengan tugas dan fungsi OPD dapat dilihat pada Tabel Indikator Kinerja dibawah ini :

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN ASAHAN		
Misi ke – 3	Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dalam Membangun Kemandirian Ekonomi	
Tujuan	Meningkatnya peran masyarakat dalam pembangunan	
Sasaran	Meningkatnya kemandirian masyarakat	
Strategi	Penguatan peran dan partisipasi masyarakat dan desa dalam pengelolaan dan pengembangan ekonomi lokal	
Kebijakan	1	Optimalisasi peran lembaga desa dalam pembangunan
	2	Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan potensi desa
	3	Penguatan kapasitas pemerintahan desa
	4	Pengembangan BUMDes sebagai upaya meningkatkan perekonomian desa
	5	Fasilitasi penyediaan sarana prasarana, akses, dan aktivitas daya dukung perekonomian desa
	6	Sinergitas program pemerintah dengan desa
	7	Ekonomi Mandiri melalui Pengembangan Kampung Mandiri
	8	Peningkatan kapasitas pemerintahan desa dalam mengefektifkan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat
	9	Pengembangan ekonomi kreatif kelompok masyarakat

NO	INDIKATOR KINERJA	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Persentase desa mandiri dan maju didasarkan dari IDM	0	1,69	1,69	2,26	2,82	3,39	3,95	3,95
2.	Rata-Rata Indeks Desa Membangun Tingkat Kabupaten (IDM)	0	0,6491	0,6527	0,6563	0,6599	0,6635	0,6671	0,6491

Mendukung Indikator Kinerja Utama, dicapai Indikator Kinerja Daerah/Program pada Dinas PMD Kabupaten Asahan Tahun 2022 sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode (RPJMD)
		Tahun 2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Tingkat tertib penyelenggaraan penataan desa	0%	21,43%	42,86%	64,29%	85,71%	100%	100%
2	Persentase Kerjasama antar Desa yang terfasilitasi	4,35%	17,39%	34,78%	52,17%	78,26%	100%	100%
3	Tingkat tertib administrasi pemerintahan desa	75,14%	80,23%	84,75%	89,83%	94,92%	100%	100%
4	Persentase lembaga kemasyarakatan yang dibina	63,44%	69,49%	77,04%	81,57%	90%	92,08%	92,08%

2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa kabupaten Asahan

Isu-isu penting dan strategis yang berkembang saat ini dan perkiraan masa mendatang adalah merupakan tantangan bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Asahan yang perlu diatasi dan ditangani dalam menjalankan tugasnya lima tahun kedepan sesuai tugas pokok dan fungsinya. Ada beberapa isu-isu yang berkembang

yaitu:

a. Belum optimalnya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam mendukung pembangunan desa;
b. Rendahnya partisipasi masyarakat melaksanakan gotong royong;
c. Masih rendahnya pengetahuan aparatur desa tentang tata cara pengelolaan keuangan desa;
d. Belum optimalnya Pemerintah Desa dalam mengelola Pendapatan Asli Desa.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review Rancangan awal Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Asahan, dapat dilihat sebagaimana tersebut dalam tabel II.4 pada lampiran renja.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat Tahun Anggaran 2022 pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Asahan, yaitu kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan, Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa, Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa, Pengembangan Ekonomi Lokal serta Pemberdayaan Masyarakat.

Selain itu seperti pada tahun 2022 telah diberikan Bantuan Keuangan, Alokasi Dana Desa (ADD) bagi desa yang sumber dari APBD Kabupaten Asahan dan Dana Desa yang bersumber dari APBN untuk Pemerintah Desa.

Selanjutnya untuk tahun anggaran 2024 juga direncanakan Kegiatan :

1. Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status Desa
2. Fasilitasi Tata Wilayah Desa
3. Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa

4. Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa
5. Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota
6. Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota
7. Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan
8. Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
9. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa
10. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa
11. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
12. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa
13. Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa
14. Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa
15. Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa
16. Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
17. Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
18. Fasilitasi Penyusunan Profil Desa
19. Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa
20. Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa
21. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD
22. Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa
23. Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan
24. Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna, Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat)
25. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat

26. Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan
27. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa
28. Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
29. Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
30. Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga
31. Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat
32. Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Rumusan Visi Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia adalah Mewujudkan Pemerintahan Desa yang Mampu Memberikan Pelayanan Prima Kepada Masyarakat**.** Untuk menetapkan kebijaksanaan nasional dan memfasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa maka ditetapkanlah misinya.

Adapun Misi Direktorat Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri RI adalah :

1. Memantapkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa guna meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat yang ditunjukkan dengan pemenuhan SPM Desa;
2. Memantapkan peran perencanaan partisipatif dengan perlibatan aktif kelembagaan masyarakat desa dalam upaya pengentasan kemiskinan pada wilayah desa dan kawasan perdesaan;
3. Memantapkan tata kelola aset dan keuangan desa berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kemanfaatan;
4. Meningkatkan kualitas kehidupan sosial budaya dan kerjasama masyarakat desa;
5. Meningkatkan kualitas evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan penyusunan peringkat tingkat perkembangan desa;
6. Meningkatkan kapasitas aparat dan lembaga masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa lingkup regional.

Selain Kementerian Dalam Negeri, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berada dibawah Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia dengan tugas “Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana prasarana desa, danpemberdayaan masyarakat desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan”

dengan fungsi sebagai berikut :

a. Perumusan kebijakan di bidang pembinaan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, dan pembangunan sarana prasarana desa, serta pemberdayaan masyarakat desa.
b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, dan pembangunan sarana prasarana desa, serta pemberdayaan masyarakat desa.
c. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pembinaan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, dan pembangunan sarana prasarana desa, serta pemberdayaan masyarakat desa.
d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, dan pembangunan sarana prasarana desa, serta pemberdayaan masyarakat desa.
e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, dan pembangunan sarana prasarana desa, serta pemberdayaan masyarakat desa.
f. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Asahan

Tujuan dari penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Asahan adalah ***Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dalam Membangun Kemandirian Ekonomi.***

Adapun sasaran dari pada penyusunan Renja ini adalah ***Meningkatnya kemandirian masyarakat***.

3.3 Program dan Kegiatan

Pada Tahun Anggaran 2024 , Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Asahan telah merencanakan sebanyak 5 (Lima) program dengan 55 (Lima Puluh Lima) kegiatan dengan sumber dana APBD sebesar Rp. 11.346.600.000,00 (Sebelas Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Enam Juta Enam Ratus Ribu Rupiah). Sedangkan untuk Perkiraan Maju Tahun 2024, sesuai dengan RPJMD Kabupaten Asahan Tahun 2021 – 2026 dan dikaitkan dengan perkembangan situasi sosial budaya masyarakat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Asahan Kab. Asahan telah merencanakan 49 (Empat Puluh Sembilan) kegiatan dengan total Pagu Anggaran sebesar Rp. 10.212.400.000,00 (Sepuluh Milyar Dua Ratus Dua Belas Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).

Adapun daftar program dan kegiatan tersebut seperti tertera dalam Tabel III. 2 dilampiran renja.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Sedangkan kegiatan yang selanjutnya disebut kegiatan perangkat daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.

Rencana program dan kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab.Asahan berisi program dan kegiatan, baik untuk mencapai secara langsung sasaran pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai kewenangan kabupaten.

Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program dan kegiatan prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan acuan bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab.Asahan dalam penyusunan Rencana Kerja.

Rencana kerja berupa program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab.Asahan sebagai instrument pelaksana dari program perangkat daerah Tahun 2024 dan prakiraan maju Tahun 2025 disajikan pada tabel dibawah ini.

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 merupakan gambaran tentang rencana program kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Asahan. Berdasarkan pengalaman dan pembahasan / evaluasi program tahun sebelumnya pelaksanaan kegiatan pada umumnya telah terlaksana dengan baik, dan tidak ada kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan.

Keberhasilan pencapaian Visi Pemerintah Kabupaten Asahan *"Masyarakat Asahan Sejahtera yang Religius dan Berkarakter"* tidak terlepas dari perencanaan yang Komprehensif dan Terpadu dengan **Visi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Asahan** yaitu ***"Terwujudnya Otonomi Desa yang Partisipatif dengan Keberdayaan Masyarakat"***.dan tidak terlepas dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Asahan.

Demikian Rencana Kerja (Renja) ini dibuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Asahan Tahun 2021 – 2026 dan dijadikan tolok ukur keberhasilan pencapaian dari setiap Program dan Kegiatan setiap tahunnya.

Kisaran, 25 Juli 2023

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
KAB. ASAHAN,

SUHERMAN SIREGAR, S.STP, MM
PEMBINA Tk. I
NIP. 19780412 199703 1 001

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. ASAHAN
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA														
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**11.346.600.000,00**							**10.212.400.000,00**	
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**						**11.346.600.000,00**							**10.212.400.000,00**	
1.	**2.13.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Tertib Administrasi Layanan Pemerintahan***	**%**		**%**	**100 %**	**3.241.600.000,00**						**100 %**	**3.442.400.000,00**	
	2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	dokumen		dokumen	8 dokumen	15.000.000,00						2 Dokumen	20.000.000,00	
	2.13.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	5.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Ekonomi Mandiri	-	2 Dokumen	10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan		Laporan	6 Laporan	10.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Ekonomi Mandiri	-	6 Laporan	10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Layanan administrasi keuangan perangkat daerah*	%		%	100 %	2.405.000.000,00						28 Orang/bulan	2.505.000.000,00	
	2.13.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan		Orang/bulan	28 Orang/bulan	2.400.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Ekonomi Mandiri	-	28 Orang/bulan	2.500.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan		Laporan	18 Laporan	5.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Ekonomi Mandiri	-	18 Laporan	5.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	%		%	100 %	15.000.000,00						25 Paket	15.000.000,00	
	2.13.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket		Paket	25 Paket	15.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Ekonomi Mandiri	-	25 Paket	15.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	%		%	100 %	186.100.000,00						1 Paket	199.400.000,00	
	2.13.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		Paket	1 Paket	5.100.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Ekonomi Mandiri	-	1 Paket	5.200.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		Paket	1 Paket	34.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Ekonomi Mandiri	-	1 Paket	35.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		Paket	1 Paket	12.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Ekonomi Mandiri	-	1 Paket	12.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		Paket	1 Paket	20.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Ekonomi Mandiri	-	1 Paket	22.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen		Dokumen	46 Dokumen	10.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Ekonomi Mandiri	-	46 Dokumen	10.200.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket		Paket	1 Paket	30.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Ekonomi Mandiri	-	1 Paket	40.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		Laporan	31 Laporan	75.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Ekonomi Mandiri	-	31 Laporan	75.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Diadakan*	Unit		Unit	7 Unit	85.000.000,00						1 Unit	116.000.000,00	
	2.13.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit		Unit	1 Unit	25.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Ekonomi Mandiri	-	1 Unit	35.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.07.05	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit		Unit	1 Unit	20.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Ekonomi Mandiri	-	1 Unit	31.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit		Unit	4 Unit	40.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Ekonomi Mandiri	-	4 Unit	50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jasa Penunjang Urusan Pemerintaah Daerah yang Disediakan*	Laporan		Laporan	12 Laporan	365.500.000,00						12 Laporan	417.000.000,00	
	2.13.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		Laporan	12 Laporan	60.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Ekonomi Mandiri	-	12 Laporan	67.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		Laporan	12 Laporan	305.500.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Ekonomi Mandiri	-	12 Laporan	350.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara*	Unit		Unit	55 Unit	170.000.000,00						21 Unit	170.000.000,00	
	2.13.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		Unit	21 Unit	100.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Ekonomi Mandiri	-	21 Unit	100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		Unit	54 Unit	20.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Ekonomi Mandiri	-	54 Unit	20.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		Unit	1 Unit	50.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Ekonomi Mandiri	-	1 Unit	50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	**2.13.02**	**PROGRAM PENATAAN DESA**	***Tingkat tertib penyelenggaraa penataan desa***	**%**		**%**	**64,29 %**	**300.000.000,00**						**64,29 %**	**250.000.000,00**	
	2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	*Desa yang mendapatkan fasilitasi Penataan Desa*	Jenis		Jenis	6 Jenis	300.000.000,00						1 Desa	250.000.000,00	
	2.13.02.2.01.01	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa														
			Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Desa		Desa	1 Desa	100.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Ekonomi Mandiri	-	1 Desa	100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.02.2.01.02	Fasilitasi Tata Wilayah Desa														
			Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	Desa		Desa	1 Desa	50.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Ekonomi Mandiri	-	1 Desa	50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.02.2.01.03	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa														
			Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya	Desa		Desa	177 Desa	50.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Ekonomi Mandiri	-	177 Desa	100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.02.2.01.04	Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa														
			Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penamaan dan Kode Desa	Desa		Desa	177 Desa	100.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Ekonomi Mandiri	-	177 Desa	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
3.	**2.13.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA**	***Persentase Kerjasama antar Desa yang terfasilitasi***	**%**		**%**	**52,17 %**	**200.000.000,00**						**52,17 %**	**150.000.000,00**	
	2.13.03.2.01	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	*Desa yang mendapatkan fasilitasi Kerja sama antar Desa*	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00						1 Dokumen	150.000.000,00	
	2.13.03.2.01.01	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Ekonomi Mandiri	-	1 Dokumen	100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.03.2.01.02	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Ekonomi Mandiri	-	1 Dokumen	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.03.2.01.03	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Ekonomi Mandiri	-	1 Dokumen	50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4.	**2.13.04**	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	***Tingkat tertib administrasi pemerintahan desa***	**%**		**%**	**89,83 %**	**6.125.000.000,00**						**89,83 %**	**4.950.000.000,00**	
	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	*Kecamatan yang mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa*	Jenis		Jenis	18 Jenis	6.125.000.000,00						3 Dokumen	4.950.000.000,00	
	2.13.04.2.01.01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa														
			Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Dokumen		Dokumen	3 Dokumen	100.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Ekonomi Mandiri	-	3 Dokumen	100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Dokumen		Dokumen	11 Dokumen	100.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Ekonomi Mandiri	-	11 Dokumen	100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Dokumen		Dokumen	3 Dokumen	50.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Ekonomi Mandiri	-	3 Dokumen	50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Dokumen		Dokumen	3 Dokumen	200.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Ekonomi Mandiri	-	3 Dokumen	100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa														
			Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Orang		Orang	177 Orang	4.000.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Ekonomi Mandiri	-	177 Orang	3.900.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.06	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Laporan		Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Ekonomi Mandiri	-	1 Laporan	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.07	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa														
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Ekonomi Mandiri	-	1 Dokumen	100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Dokumen		Dokumen	3 Dokumen	200.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Ekonomi Mandiri	-	3 Dokumen	100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa														
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Laporan		Laporan	1 Laporan	500.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Ekonomi Mandiri	-	1 Laporan	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.10	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Laporan		Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Ekonomi Mandiri	-	1 Laporan	50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa														
			Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Ekonomi Mandiri	-	1 Dokumen	50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.12	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Ekonomi Mandiri	-	1 Dokumen	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Ekonomi Mandiri	-	1 Dokumen	100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD														
			Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Orang		Orang	177 Orang	100.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Ekonomi Mandiri	-	177 Orang	100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.15	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa														
			Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	Desa		Desa	10 Desa	100.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Ekonomi Mandiri	-	10 Desa	100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan														
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Ekonomi Mandiri	-	1 Dokumen	100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.	**2.13.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	***Persentase lembaga kemasyarakatan yang dibina***	**%**		**%**	**81,57 %**	**1.480.000.000,00**						**81,57 %**	**1.420.000.000,00**	
	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Kecamatan yang mendapatkan pembinaan dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan*	Jenis		Jenis	11 Jenis	1.480.000.000,00						2 Dokumen	1.420.000.000,00	
	2.13.05.2.01.02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat														
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	100.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Ekonomi Mandiri	-	2 Dokumen	100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga		Lembaga	1 Lembaga	100.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Ekonomi Mandiri	-	1 Lembaga	100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.04	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Unit		Unit	2 Unit	100.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Ekonomi Mandiri	-	2 Unit	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	100.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Ekonomi Mandiri	-	2 Dokumen	100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.13.05.2.01.06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Laporan		Laporan	2 Laporan	100.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Ekonomi Mandiri	-	2 Laporan	100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Laporan		Laporan	2 Laporan	80.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Ekonomi Mandiri	-	2 Laporan	100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Dokumen		Dokumen	3 Dokumen	700.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Ekonomi Mandiri	-	3 Dokumen	720.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.10	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga		Keluarga	35 Keluarga	100.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Ekonomi Mandiri	-	35 Keluarga	100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.11	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Keluarga		Keluarga	35 Keluarga	100.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Ekonomi Mandiri	-	35 Keluarga	100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	J U M L A H							**11.346.600.000,00**							**10.212.400.000,00**	

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

TRIWULAN IV TAHUN 2022

No.	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Darah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan AnggaranRenja Perangkat Darah Tahun Berjalan (Tahun n-1 yang dievaluasi)		Relisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d tahun 2022(%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	*2*		*3*	*4*		*5*		*6*		*7*	*8*		*9*		*10*		*11*		*12*		*14*		*13*		*14*		*15*
			DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																								
			A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	**Tertib administrasi layanan pemerintahan**																							
			1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja pemgkat daerah**																							
			1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dok	20,150,000.00	0 Dok	-	0 Dok	-	0 Dok	-	0 Dok	-	0 Dok	-	0 Dok	-	0 Dok	-	0.00	0.00	0 Dok	-	0.00	0.00	Dinas Pemdes
			2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30 Dok	60,001,755.00	0 Dok	-	6 Dok	20,001,775	0 Dok	-	3 Dok	5,389,526	2 Dok	-	1 Dok	14,441,000	6 Dok	19,830,526.00	100.00	99.14	6 Dok	19,830,526	20.00	33.05	Dinas Pemdes
			2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																								
			1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28 Orang /Bln	14,871,164,750.68	28 Orang /Bln	2,389,691,294.00	25 Orang /Bln	3,109,785,237	25 Orang /Bln	584,913,335	- Orang /Bln	873,809,881	- Orang /Bln	855,441,012	- Orang /Bln	783,843,914	25 Orang /Bln	3,098,008,142.00	100.00	99.62	53 Orang /Bln	5,487,699,436	0.00	0.00	Dinas Pemdes
			2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	108 Lap	20,000,000.00	18 Lap	-	0 Lap	-	0 Lap	-	0 Lap	-					0 Lap		0.00	0.00	18 Lap	-	0.00	0.00	Dinas Pemdes
			3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																								
			1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket Pekaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	4 Paket	61,950,000.00	0 Paket	-	0 Paket	-	0 Paket	-	0 Paket	-	0 Paket	-	0 Paket	-	0 Paket	-	0.00	0.00	0 Paket	-	0.00	0.00	Dinas Pemdes
			2 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Org	100,000,000.00	0 Org	-	0 Org	-	0 Org	-	0 Org	-	0 Org	-	0 Org	-	0 Org	-	0.00	0.00	0 Org	-	0.00	0.00	Dinas Pemdes
			4 Administrasi Umum Perangkat Daerah																								
			1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6 Paket	30,430,492.00	1 Paket	5,005,000.00	1 Paket	5,022,775	0 Paket	-	0 Paket	-	0 Paket	-	1 Paket	4,770,700	1 Paket	4,770,700.00	100.00	94.98	2 Paket	9,775,700	33.33	32.12	Dinas Pemdes
			2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6 Paket	203,829,950.00	1 Paket	32,220,583.00	1 Paket	32,763,225	0 Paket	-	1 Paket	13,524,000	0 Paket	13,609,950	0 Paket	5,593,450	1 Paket	32,727,400.00	100.00	99.89	2 Paket	64,947,983	33.33	31.86	Dinas Pemdes
			3 Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan logistik kantor	6 Paket	70,012,500.00	1 Paket	10,006,000.00	1 Paket	12,006,500	0 Paket	-	0 Paket	-	0 Paket	-	1 Paket	12,006,500	1 Paket	12,006,500.00	100.00	100.00	2 Paket	22,012,500	33.33	31.44	Dinas Pemdes
			4 Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengadaan	6 Paket	130,831,150.00	1 Paket	20,001,145.00	1 Paket	20,830,000	0 Paket	-	1 Paket	10,414,850	0 Paket	5,207,450	0 Paket	5,207,450	1 Paket	20,829,750.00	100.00	100.00	2 Paket	40,830,895	33.33	31.21	Dinas Pemdes
			5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	276 Dok	61,208,000.00	46 Dok	10,035,000.00	46 Dok	10,020,000	0 Dok	-	0 Dok	-	0 Dok	-	46 Dok	9,905,000	46 Dok	9,905,000.00	100.00	98.85	92 Dok	19,940,000	33.33	32.58	Dinas Pemdes
			6 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material	6 Paket	254,533,125.00	0 Paket	-	0 Paket	-	0 Paket	-	0 Paket	-	0 Paket	-	0 Paket	-	0 Paket	-	0.00	0.00	0 Paket	-	0.00	0.00	Dinas Pemdes
			7 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	186 Lap	452,984,000.00	25 Lap	68,364,798.00	31 Lap	88,617,000	0 Lap	-	10 Lap	9,074,400	10 Paket	14,101,500.00	11 Paket	62,181,449	31 Lap	85,357,349.00	100.00	96.32	56 Lap	153,722,147	30.11	33.94	Dinas Pemdes
			5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																								
			1 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	4 Unit	434,500,000.00	0 Unit	-	0 Unit	-	0 Unit	-	0 Unit	-	0 Unit	-	0 Unit	-	0 Unit	-	0.00	0.00	0 Unit	-	0.00	0.00	Dinas Pemdes
			2 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 Unit	146,500,000.00	0 Unit	-	0 Unit	-	0 Unit	-	0 Unit	-	0 Unit	-	0 Unit	-	0 Unit	-	0.00	0.00	0 Unit				
			3 Pengadaan Mebel	Jumlah paket Mebel	13 Unit	146,300,000.00	0 Unit	-	1 Unit	28,500,000	0 Unit	-	0 Unit	-	1 Unit	28,500,000	0 Unit	-	1 Unit	28,500,000.00	100.00	100.00	1 Unit	28,500,000	7.69	19.48	Dinas Pemdes
			4 Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	30 Unit	442,203,731.00	9 Unit	55,187,500.00	6 Unit	63,824,000	0 Unit	-	1 Unit	7,703,000	1 Unit	17,800,000.00	4 Unit	28,300,000	6 Unit	53,803,000.00	100.00	84.30	15 Unit	108,990,500	0.00	0.00	Dinas Pemdes
			6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																								
			1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	72 Lap	388,367,805.00	12 Lap	29,585,932.00	12 Lap	63,368,400	3 Lap	7,930,024	3 Lap	8,330,587	3 Lap	5,595,942	3 Lap	14,285,656	12 Lap	36,142,209.00	100.00	57.04	24 Lap	65,728,141	33.33	16.92	Dinas Pemdes
			2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	72 Lap	2,033,246,125.00	12 Lap	326,520,120.00	12 Lap	327,422,650	3 Lap	77,700,000	3 Lap	79,410,446	3 Lap	75,553,979	3 Lap	76,753,970	12 Lap	309,418,395.00	100.00	94.50	24 Lap	635,938,515	33.33	31.28	Dinas Pemdes
			7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan																								
			1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	21 Unit	634,064,292.00	21 Unit	124,967,458	21 Unit	100,280,000	0 Unit	-	21 Unit	30,145,473	0 Unit	4,809,000	0 Unit	57,678,304	21 Unit	92,632,777.00	100.00	92.37	42 Unit	217,600,235	0.00	0.00	Dinas Pemdes
			2 Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	54 Unit	110,340,000.00	46 Unit	17,820,000.00	46 Unit	10,030,000	0 Unit	-	20 Unit	4,910,000	20 Unit	2,460,000	6 Unit	2,650,000	46 Unit	10,020,000.00	100.00	99.90	92 Unit	27,840,000	170.37	25.23	Dinas Pemdes
			3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	1 Unit	280,961,000.00	1 Unit	40,920,750.00	1 Unit	225,114,000	0 Unit	-	0 Unit	-	1 Unit	22,893,000	0 Unit	201,232,500	1 Unit	224,125,500.00	100.00	99.56	2 Unit	265,046,250	200.00	94.34	Dinas Pemdes
			4 Pemeliharaan/Rehabilasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Unit Dipelihara / Direhabilitasi	10 Unit	10,000,000.00	0 Unit	-	0 Unit	-	0 Unit	-	0 Unit	-	0 Unit	-	0 Unit	-	0 Unit		0.00	0.00	0 Unit	-	0.00	0.00	Dinas Pemdes

No.	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Darah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan AnggaranRenja Perangkat Darah Tahun Berjalan (Tahun n-1 yang dievaluasi)		Relisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d tahun 2022(%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2		3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		14		13		14		15
										Rata - Rata Capaian Kinerja (%)											**56.52**	**52.94**			**31.50**	**19.69**	
										Predikat Kinerja											**Rendah**	**Rendah**			**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**	
			B PROGRAM PENATAAN DESA																								
			1 Penyelenggaraan Penataan Desa																								
			1 Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	1 Desa	100,000,000.00	0 Desa	-	0 Desa	-	0 Desa	-	0 Desa	-	0 Desa	-	0 Desa	-	0 Desa	-	0.00	0.00	0 Desa	-	0.00	0.00	Dinas Pemdes
			2 Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	177 Desa	369,999,125.00	0 Desa	-	1 Desa / Wilayah	50,000,125.00	1 Desa / Wilayah	15,642,400	0 Desa / Wilayah	4,796,400	0 Desa / Wilayah	9,243,125	0 Desa / Wilayah	20,049,900	1 Desa / Wilayah	49,731,825.00	100.00	99.46	1 Desa	49,731,825	0.00	0.00	Dinas Pemdes
			3 Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya	177 Desa	100,000,000.00	0 Desa	-	0 Desa	-	0 Desa	-	0 Desa	-	0 Desa	-	0 Desa	-	0 Desa	-	0.00	0.00	0 Desa	-	0.00	0.00	Dinas Pemdes
			4 Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penamaan dan Kode Desa	177 Desa	100,000,000.00	0 Desa	-	0 Desa	-	0 Desa	-	0 Desa	-	0 Desa	-	0 Desa	-	0 Desa	-	0.00	0.00	0 Desa	-	0.00	0.00	Dinas Pemdes
			5 Fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Lap	100,000,000.00	0 Lap	-	0 Lap	-	0 Lap	-	0 Lap	-	0 Lap	-	0 Lap	-	0 Lap	-	0.00	0.00	0 Lap	-	0.00	0.00	Dinas Pemdes
			6 Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa	5 Unit	300,000,000.00	0 Unit	-	0 Unit	-	0 Unit	-	0 Unit	-	0 Unit	-	0 Unit	-	0 Unit	-	0.00	0.00	0 Unit	-	0.00	0.00	Dinas Pemdes
										Rata - Rata Capaian Kinerja (%)											**16.67**	**16.58**			**0.00**	**0.00**	
										Predikat Kinerja											**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**			**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**	
			C PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA																								
			1 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa																								
			1 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	4 Dok	330,000,000.00	1 Dok	12,915,700	0 Dok	-	0 Dok	-	0 Dok	-	0 Dok	-	0 Dok	-	0 Dok	-	0.00	0.00	1 Dok	12,915,700	0.00	0.00	Dinas Pemdes
			2 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	4 Dok	400,000,000.00	0 Dok	-	0 Dok	-	0 Dok	-	0 Dok	-	0 Dok	-	0 Dok	-	0 Dok	-	0.00	0.00	0 Dok	-	0.00	0.00	Dinas Pemdes
			3 Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	2 Dok	150,000,000.00	0 Dok	-	1 Dok	50,000,000.00	0 Dok	-	1 Dok	2,438,200	0 Dok	12,745,600	0 Dok	17,946,400	1 Dok	33,130,200.00	100.00	66.26	1 Dok	33,130,200	0.00	0.00	Dinas Pemdes
										Rata - Rata Capaian Kinerja (%)											**33.33**	**22.09**			**0.00**	**0.00**	
										Predikat Kinerja											**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**			**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**	
			D PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA																								
			1 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi																								
			1 Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	3 Dok	360,000,000.00	0 Dok	-	0 Dok	-	0 Dok	-	0 Dok	-	0 Dok	-	0 Dok	-	0 Dok	-	0.00	0.00	0 Dok	-	0.00	0.00	Dinas Pemdes
			2 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa	11 Dok	400,000,000.00	0 Dok	-	0 Dok	-	0 Dok	-	0 Dok	-	0 Dok	-	0 Dok	-	0 Dok	-	0.00	0.00	0 Dok	-	0.00	0.00	Dinas Pemdes
			3 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	6 Dok	277,212,650.00	1 Dok	34,467,150.00	1 Dok	27,211,150	0 Dok	-	1 Dok	16,194,625	0 Dok	-	0 Dok	10,259,525	1 Dok	26,454,150.00	100.00	97.22	2 Dok	60,921,300	33.33	21.98	Dinas Pemdes
			4 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	18 Dok	760,751,750.00	3 Dok	238,694,250.00	3 Dok	332,750,100	3 Dok	73,703,450	0 Dok	19,771,150	0 Dok	5,310,000	0 Dok	215,292,060	3 Dok	314,076,660.00	100.00	94.39	6 Dok	552,770,910	33.33	72.66	Dinas Pemdes
			5 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	177 Org	21,971,577,750.00	177 Org	2,289,686,496	177 Org	3,904,282,592	177 Org	802,961,956	0 Org	776,254,986	0 Org	768,533,712	0 Org	778,453,728	177 Org	3,126,204,382.00	100.00	80.07	354 Org	5,415,890,878	200.00	24.65	Dinas Pemdes
			6 Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Musyawarah Desa	3 Dok	100,000,000.00	0 Dok	-	0 Dok	-	0 Dok	-	0 Dok	-	0 Dok	-	0 Dok	-	0 Dok	-	0.00	0.00	0 Dok	-	0.00	0.00	Dinas Pemdes
			7 Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	3 Dok	100,000,000.00	0 Dok	-	0 Dok	-	0 Dok	-	0 Dok	-	0 Dok	-	0 Dok	-	0 Dok	-	0.00	0.00	0 Dok	-	0.00	0.00	Dinas Pemdes
			8 Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	177 Desa	619,999,850.00	177 Desa	106,079,550	177 Desa	200,000,200	177 Desa	15,498,200	0 Desa	25,857,950	0 Desa	89,870,500	0 Desa	66,210,750	177 Desa	197,437,400.00	100.00	98.72	354 Desa	303,516,950	200.00	48.95	Dinas Pemdes
			9 Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	177 Desa	2,848,667,582.00	0 Desa	-	90 Desa	3,848,490,503	0 Desa	11,500,625	0 Desa	360,704,075	90 Desa	2,277,813,891.80	0 Desa	860,317,274	90 Desa	3,510,335,865.80	100.00	91.21	90 Desa	3,510,335,866	50.85	123.23	Dinas Pemdes
			10 Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	6 Lap	428,597,250.00	1 Lap	55,386,638.00	1 Lap	50,000,000	1 Lap	14,660,000.00	0 Lap	11,129,000	0 Lap	-	0 Lap	8,313,600	1 Lap	34,102,600.00	100.00	68.21	2 Keg	89,489,238	0.00	0.00	Dinas Pemdes
			11 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa	5 Dok	284,998,750.00	1 Dok	73,375,750	0 Dok	-	0 Dok	-	0 Dok	-	0 Dok	-	0 Dok	-	0 Dok	-	0.00	0.00	1 Dok	73,375,750	20.00	25.75	Dinas Pemdes
			12 Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	1 Dok	100,000,000.00	0 Keg	-	0 Keg	-	0 Keg	-	0 Keg	-	0 Keg	-	0 Keg	-	0 Keg	-	0.00	0.00	0 Dok	-	0.00	0.00	Dinas Pemdes
			13 Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	177 Dok	120,000,000.00	0 Dok	-	0 Dok	-	0 Dok	-	0 Dok	-	0 Dok	-	0 Dok	-	0 Dok	-	0.00	0.00	0 Dok	-	0.00	0.00	Dinas Pemdes
			14 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	177 Org	100,000,000.00	0 Org	-	0 Org	-	0 Org	-	0 Org	-	0 Org	-	0 Org	-	0 Org	-	0.00	0.00	0 Org	-	0.00	0.00	Dinas Pemdes
			15 Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam PenetapanDan Penegasan Batas Desa	40 Desa	400,000,000.00	0 Desa	-	0 Desa	-	0 Desa	-	0 Desa	-	0 Desa	-	0 Desa	-	0 Desa	-	0.00	0.00	0 Desa	-	0.00	0.00	Dinas Pemdes
			16 Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Laporan Kepala Desa	3 Lap	200,000,000.00	0 Lap	-	0 Lap	-	0 Lap	-	0 Lap	-	0 Lap	-	0 Lap	-	0 Lap	-	0.00	0.00	0 Lap	-	0.00	0.00	Dinas Pemdes
			17 Pelaksanaan Perugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	Jumlah Dokumen Perugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	1 Dok	100,000,000.00	0 Dok	-	0 Dok	-	0 Dok	-	0 Dok	-	0 Dok	-	0 Dok	-	0 Dok	-	0.00	0.00	0 Dok	-	0.00	0.00	Dinas Pemdes
			18 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta lomba desa dan kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	6 Dok	862,999,000.00	1 Dok	158,099,000	1 Dok	175,000,263	1 Dok	12,635,700	0 Dok	-	0 Dok	154,351,263	0 Dok	6,582,100	1 Dok	173,569,063.00	100.00	99.18	2 Dok	331,668,063	33.33	38.43	Dinas Pemdes
										Rata - Rata Capaian Kinerja (%)											**38.89**	**34.94**			**31.71**	**19.76**	

No.	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan AnggaranRenja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1 yang dievaluasi)		Relisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d tahun 2022(%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2		3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		14		13		14		15
				Predikat Kinerja																	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
			E PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT																								
			1 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam daerah Kabupaten/Kota																						
			1 Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	1 Dok	100,000,000.00	0 Dok	-	0 Dok	-	0 Dok	-	0 Dok	-	0 Dok	-	0 Dok	-	0 Dok	-	0.00	0.00	0 Dok	-	0.00	0.00	Dinas Pemdes
			2 Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	10 Dok	500,000,000.00	0 Dok	-	2 Dok	100,000,051	0 Dok	-	1 Dok	38,511,440	0 Dok	16,761,702	1 Dok	40,067,500	2 Dok	95,340,642.00	100.00	95.34	2 Dok	95,340,642	20.00	19.07	Dinas Pemdes
			3 Penigkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	3 Lembaga	849,999,800.00	3 Lembaga	243,974,250	3 Lembaga	140,000,202	0 Lembaga	-	0 Lembaga	-	3 Lembaga	137,337,290	0 Lembaga	2,245,400	3 Lembaga	139,582,690.00	100.00	99.70	6 Lembaga	383,556,940	200.00	45.12	Dinas Pemdes
			4 Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	2 Unit	100,000,000.00	0 Unit	-	0 Unit	-	0 Unit	-	0 Unit	-	0 Unit	-	0 Unit	-	0 Unit	-	0.00	0.00	0 Unit	-	0.00	0.00	Dinas Pemdes
			5 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	10 Dok	555,000,000.00	1 Dok	46,857,200	3 Dok	114,000,000	0 Dok	-	1 Dok	34,702,850	1 Dok	25,663,150	1 Dok	39,978,000	3 Dok	100,344,000.00	100.00	88.02	4 Dok	147,201,200	40.00	26.52	Dinas Pemdes
			6 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	13 Lap	668,061,263.00	2 Lap	75,567,200	2 Lap	83,339,000	0 Lap	-	1 Lap	15,284,900	0 Lap	20,380,450	1 Lap	41,631,675	2 Lap	77,297,025.00	100.00	92.75	4 Lap	152,864,225	30.77	22.88	Dinas Pemdes
			7 Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	12 Lap	36,890,671,558.00	2 Lap	7,076,531,200	2 Lap	80,000,008	0 Lap	-	1 Lap	2,398,200	1 Lap	21,301,838	0 Lap	54,055,000	2 Lap	77,755,038.00	100.00	97.19	4 Lap	7,154,286,238	33.33	19.39	Dinas Pemdes
			8 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Ketentraman, Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	1 Dok	100,000,000.00	0 Dok	-	0 Dok	-	0 Dok	-	0 Dok	-	0 Dok	-	0 Dok	-	0 Bln	-	0.00	0.00	0 Dok	-	0.00	0.00	Dinas Pemdes
			9 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	18 Dok	4,201,377,499.00	3 Dok	664,880,300	3 Dok	700,000,258	1 Dok	55,890,634	1 Dok	165,764,088	1 Dok	132,029,732	0 Dok	321,396,876	3 Dok	675,081,330.00	100.00	96.44	6 Dok	1,339,961,630	33.33	31.89	Dinas Pemdes
			10 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	35 Keluarga	100,000,000.00	0 Keluarg	-	0 Keluarga	-	0 Keluarga	-	0 Keluarga	-	0 Keluarga	-	0 Keluarga	-	0 Keluarga	-	0.00	0.00	0 Keluarga	-	0.00	0.00	Dinas Pemdes
			11 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	35 Keluarga	100,000,000.00	0 Keluarg	-	0 Keluarga	-	0 Keluarga	-	0 Keluarga	-	0 Keluarga	-	0 Keluarga	-	0 Keluarga	-	0.00	0.00	0 Keluarga	-	0.00	0.00	Dinas Pemdes
						97,113,492,502.68		14,206,840,264.00		13,972,660,014.00										12,668,520,118.80							
				Rata - Rata Capaian Kinerja (%)																	54.55	51.77			32.48	14.99	
				Predikat Kinerja																	Rendah	Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
				Rata - Rata Capaian Kinerja (%)																	39.99	35.66			19.14	10.89	
				Predikat Kinerja																	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : (1) Ketersediaan Anggaran Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan; (2) Kesesuaian Perencanaan dengan Penganggaran serta pelaksanaan Program/Kegiatan

Faktor Penghambat pencapaian kinerja : (1) Proses administrasi pengadaan barang/jasa pada kegiatan pembangunan fisik mengalami keterlambatan (2) Progres serapan anggaran program/kegiatan yang masih sangat rendah pada setiap OPD (3) Keterlambatan

Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : (1). Mempercepat penyerapan anggaran program/kegiatan dengan segera melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tidak perlu menunggu proses administrasi pengadaan barang/jasa dari ULP. (2) Melakukan monitoring pelaksanaan program/kegiatan

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : (1) Memperbaiki sistem perencanaan dengan melakukan peningkatan sinkronisasi dokumen perencanaan (RKPD) dengan dokumen penganggaran (APBD). (2). Melakukan evaluasi capaian Indikator Kinerja OPD setiap triwulan.